



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

SEKRETARIAT DPRD

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 158 /KPTS/SEK. DPRD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 68/ KPTS/ SEK. DPRD/2021 TENTANG
PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2021.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dimana terdapat perubahan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan Anggaran Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD tahun Anggaran 2021, perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Nomor 68/KPTS/SEK. DPRD/2021, tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Nomor 68/KPTS/SEK. DPRD/2021, tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan dan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid 19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Prekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 144);
Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD
Kabupaten Wajo tahun 2021;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wajo tentang Perubahan Atas Keputusan
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor 68/KPTS/SEK. DPRD/2021, tentang Penetapan Dan
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wajo Tahun Anggaran 2021.
- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksanan
Teknis Kegiatan (PPTK), pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai
tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran Atas pelaksanaan
kegiatan.
- KETIGA** : Melakukan penyesuaian besaran anggaran kegiatan pada
setiap kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo
Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI SENKANG

PADA TANGGAL : 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WAJO

Drs. SAINAL HAYAT. M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda I, IV/c

Nip. 19670101 199603 1 007

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Wajo, di Sengkang;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah
Kab. Wajo
5. Arsip

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|--|--|--|---|------|
| NO. | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | JABATAN | KEGIATAN YANG DIKENDALIKAN | ANGGARAN (Rp) | KET. |
| 1. | ANDI GUSNISAM, S.H NIP. 19820819 200902 1 004 | Kepala Bidang Administrasi Kesejahteraan | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK-A-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK-A-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 8. Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 14. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 15. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 3.224.785.639 16.994.548.772 9.665.850 4.079.850 4.079.300 3.199.900 3.200.000 1.100.850 2.130.446.700 267.435.370 152.000.000 64.600.000 3.200.000 8.530.816.600 28.231.100 31.421.389.931 | |
| 2. | Dra. ANDI NASRAH NIP. 19641231 198603 2 114 | Kasibag. Perlengkapan dan Rumah Tangga | 1. Fasilitas Kunjungan Tamu 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3. Pengadaan Mebel 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 10. Penyediaan Pakan Dinas dan Airbaw DPRD | 30.000.000 1.031.120.000 17.022.500 342.762.850 111.495.350 76.371.680 667.136.800 429.111.200 357.618.450 331.575.250 3.394.214.080 | |
| 3. | MUDARNIN JOYOPRANOTO, S.Sos NIP. 19691230 199202 1 006 | Kasubag. Administrasi Umum dan Kepegawaian. | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan/Material 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pengeluaran Kelengkapan dan Analisis Jabatan 5. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 17.497.900 14.998.495 5.040.000 3.500.000 120.000.000 395.534.000 556.570.395 | |
| JUMLAH | | | | 35.372.174.406 | |
| JUMLAH 1 s/d 3 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------|--|--|---|--|---|
| 4. | BAYU UTOMO PUTRA, SH., M.A.P NIP. 19870531 201101 1 001 | Kasubag. Perencanaan Perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyenggaraan Kajian Perundang-undangan Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Penyusunan Tata Tertib DPRD Bimbingan Teknis DPRD Penyusunan Kode Etik DPRD Pemeliharaan Tenaga Ahli Fraksi | 116.000.000 16.000.000 181.500.000 75.000.000 241.500.000 12.499.950 232.200.000 7.499.850 229.999.750 1.112.199.550 | |
| 5. | Dra. RACHMAENY RACHMAN NIP. 19640131 199109 2 001 | Kabag. Legislasi dan Persidangan | <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyusunan Program Kerja DPRD Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 9.529.700 133.602.600 4.482.400 19.913.800 167.528.500 | |
| 6. | ANDI ENNY SURAHMAT, S.Sos NIP. 19761003 201406 2 001 | Kasubag. Humas dan Protokoler | <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 662.449.930 45.589.850 693.956.906 43.800.000 1.445.796.686 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. | Dra. RATNA NINGSIH, M.Si NIP. 19680427 199302 2 006 | Kabag. Penganggaran dan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Perubahan | 40.845.850 19.994.800 43.640.400 104.481.050 | |
| 8. | ANDI RISTA AYU, S.Sos NIP. 19730513 200902 2 001 | Kasubag. Penganggaran | <ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan APBD | 17.749.300 19.994.800 49.994.400 87.738.500 | |
| 9. | BESSE VIVI ADRIANI, SE., M.Si NIP. 19770525 200701 2 017 | Kasubag. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK Pengawasan Penggunaan Anggaran | 3.499.100 11.704.000 15.203.100 | |
| 10 | ADIPATI HAMDAN KISYRA, S.E NIP. 19771003 200701 1 007 | Kasubag. Fasilitas Reses dan Aspirasi | <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Reses | 886.799.600 | |
| JUMLAH | | | | 886.799.600 | |
| JUMLAH 7 s/d 10 | | | | 1.094.222.250 | |
| JUMLAH 1 s/d 10 | | | | 39.191.921.392 | |